

PROGRAM RISE DI INDONESIA

Kontribusi dalam Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran



Kata Pengantar

Dalam lima tahun pelaksanaannya, Program RISE di Indonesia mengerjakan penelitian dengan 16 topik di tingkat lokal maupun nasional. Sebanyak 9 studi tentang guru, 5 studi tentang inovasi pendidikan, 1 studi tentang dampak pengenalan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) terhadap nilai Ujian Nasional, dan 1 studi tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kami menjalankan penelitian berskala besar dan mengumpulkan data primer dari 85.000 responden dan menjalin kerja sama dengan 4 pemerintah daerah yang menjadi laboratorium pembelajaran untuk studi-studi RISE. Kami telah menerbitkan 17 kertas kerja dan lebih dari 200 publikasi lanjutan yang terdiri dari catatan kebijakan, infografik, video, blog hingga siniar.

Ada tiga catatan yang perlu digarisbawahi dari kegiatan besar Program RISE di Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Pertama, kami mendayagunakan keahlian dan pengalaman kontekstual kami untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama pada sistem pendidikan Indonesia. Kami berhasil bekerja sama secara erat dengan pemerintah, mulai dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hingga beberapa pemerintah kabupaten/kota di berbagai penjuru Indonesia. Dengan memastikan bahwa topik penelitian kami didorong oleh kebutuhan di lapangan, kami berhasil menyeimbangkan mandat untuk berkontribusi pada pengumpulan pengetahuan global sekaligus memastikan bahwa hasil kerja kami pun relevan untuk para pembuat kebijakan di Indonesia.

Kedua, tim kami menggunakan beragam metode penelitian yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda-beda. Selain metode kuantitatif dan RCT, kami juga menjalankan penelitian etnografi selama 6 bulan serta sebuah penelitian longitudinal selama 2 tahun dengan pengumpulan data menggunakan metode “diari” (*diary study*).

Terakhir, strategi penelitian kami mengikuti permasalahan yang ada di lapangan. Kami tidak serta-merta menawarkan program baru, melainkan fokus untuk mengidentifikasi hambatan mendasar dan mengakar yang sudah ada, namun selama ini belum terlalu diperhatikan.

Program RISE di Indonesia telah menunjukkan bahwa bukti yang berkualitas tinggi, keterlibatan partisipatoris dengan pembuat kebijakan, dan fokus perhatian pada pemecahan masalah yang riil dapat mendorong terjadinya reformasi. Tantangan selanjutnya adalah menghubungkan skala masalah dengan bagaimana mengimplementasikan metode-metode ini di negara berkembang yang

memiliki 3 zona waktu dan 762 bahasa berbeda. Kami sudah berada di jalur yang benar, namun belum tiba di tujuan.

Sistem pendidikan Indonesia sangat besar, memayungi 3 juta guru dan 69 juta siswa SD dan SMP. Dengan sistem desentralisasi, lebih dari 500 pemerintah kabupaten/kota memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan pendidikan mereka secara mandiri. Tanpa pemulihan kebijakan yang khusus, penurunan kemampuan siswa akibat penutupan sekolah yang berkepanjangan dapat memperburuk krisis pembelajaran yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kami akan terus bekerja sama dengan para pembuat kebijakan dalam mengkaji isu-isu pendidikan, serta para mitra global yang memiliki kekhawatiran serupa.

Sudarno Sumarto, Ketua Tim Program RISE di Indonesia

Gambaran Umum

Program RISE (*Research on Improving Systems of Education*) di Indonesia adalah bagian dari penelitian multinegara berskala besar untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di seluruh dunia. Di Indonesia, RISE mengkaji **reformasi guru di tingkat nasional** (*Reform Area A* yang terdiri dari 8 studi) dan **inovasi kebijakan pendidikan di daerah** (*Reform Area B* yang terdiri dari 7 studi). Pada awal pandemi COVID-19, satu studi ditambahkan yang secara khusus menyelidiki **dampak pandemi terhadap pembelajaran siswa**.

Kegiatan penelitian RISE di Indonesia berlangsung pada 2017–2022. Dalam pelaksanaannya, RISE bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah yang juga menjadi laboratorium pembelajaran untuk merancang, mengevaluasi, dan membuat kebijakan pendidikan mereka lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat mitra tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Program RISE di Indonesia dikelola dan dipimpin oleh The SMERU Research Institute yang bekerja sama dengan the Amsterdam Institute for Global Health and Development dan Mathematica Policy Research.

A1 | PEREKRUTAN GURU

Berbagai hasil asesmen guru, seperti Uji Kompetensi Guru, menunjukkan rendahnya kompetensi guru Indonesia. Hasil *Programme for International Students Assessment (PISA)* 2018 juga memperlihatkan sejumlah kualitas guru di Indonesia yang dianggap dapat menghambat belajar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas guru adalah **meningkatkan kualitas guru yang direkrut**. Bagaimana sebenarnya lanskap perekrutan guru di Indonesia? Faktor apa yang membuat perekrutan guru belum berhasil menjangkau guru-guru dengan kualitas baik? Bagaimana sistem perekrutan aparatur sipil negara (ASN) memengaruhi kualitas guru di sekolah negeri? Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perekrutan guru guna memahami masalah mendasar yang menghambat perekrutan guru berkualitas di Indonesia.



Temuan studi

- Pembagian kewenangan untuk perekrutan guru antarkementerian maupun antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah masih tumpang-tindih.
- Proses perekrutan guru yang berkualitas baik sulit tercapai karena tersita kepentingan ekonomi politik berbagai pihak: politisi, kementerian, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan organisasi guru.
- Guru menganggap identitas utama mereka adalah sebagai PNS alih-alih pendidik.
- Proses perekrutan guru sebagai bagian dari perekrutan PNS secara umum mengutamakan pentingnya wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum daripada kecakapan mengajar.
- Adanya anggapan dari calon guru bahwa tidak perlu pintar untuk bisa jadi guru, dan bisa memulai karier mengajar sebagai guru honorer karena nantinya akan diangkat sebagai PNS.

Publikasi



Kertas kerja “*The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia: Institutional and Social Dysfunctions*” (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)



Infografik “Perekrutan Guru di Indonesia: Disfungsi Kelembagaan dan Dinamika Sosial”



Catatan kebijakan “Strategi untuk Memperbaiki Perekrutan Guru di Indonesia”



Blog “Dimensi Politik dalam Rekrutmen Guru”



Blog “Proses rekrutmen sebagai ASN membuat guru di Indonesia berkualitas rendah”

A2

KRITERIA SELEKSI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRAJABATAN

Di Indonesia, calon guru atau guru muda dengan pengalaman mengajar kurang dari lima tahun harus menjalani program **Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan** selama satu tahun. Kuota PPG Prajabatan sangat terbatas dimana calon guru harus menjalani seleksi dan tes penerimaan untuk bisa diterima dalam program PPG Prajabatan.



Dengan demikian, calon guru yang mengikuti PPG Prajabatan dianggap memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dari rekan sejawatnya karena telah lulus seleksi dan tes penerimaan sehingga diharapkan akan menjadi guru yang bermutu baik. Penelitian ini meninjau apakah kriteria penerimaan mahasiswa PPG Prajabatan dapat memprediksi kinerja guru di Indonesia.

Temuan studi

Kriteria penerimaan mahasiswa PPG prajabatan dapat memprediksi kinerja calon guru pada ujian penentuan kelulusan PPG Prajabatan, tetapi tidak dapat memprediksi efektivitas mengajar mereka di kelas.

Publikasi



Kertas kerja “*Selecting Teachers in Indonesia: Predicting Teacher Performance using Pre-Employment Information*” (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)



Catatan kebijakan “Memperbaiki Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Guru di Indonesia”

A2

EVALUASI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRAJABATAN

Undang-Undang Guru Tahun 2005 mengamanatkan setiap guru harus minimal bergelar sarjana (S-1). Selepas menempuh S-1, calon guru dapat mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru. Namun, jumlah kursi di PPG prajabatan sangat terbatas. Hanya calon guru yang lulus seleksi dan tes penerimaan—pemegang gelar Sarjana Pendidikan atau gelar sarjana lainnya—yang bisa mengikuti program ini. Penelitian ini mengkaji sejauh mana perbedaan kualitas guru-guru lulusan PPG prajabatan yang sudah tersertifikasi dan dianggap profesional dibandingkan guru-guru lulusan universitas yang sama, namun tidak mengikuti program tersebut.



Temuan studi

- Hasil tes pengetahuan konten dan pengetahuan konten pedagogis yang terstandarisasi menunjukkan PPG tidak berdampak terhadap pengetahuan profesional guru.
- PPG tidak menunjukkan dampak terhadap skor hasil tes numerasi dan literasi siswa yang diajar oleh guru-guru lulusan PPG.
- Kurang beragamnya efek PPG sebagian merupakan cerminan dari desain yang kurang bagus dan implementasi program yang terpecah-pecah.
- Motivasi utama calon guru mengikuti PPG prajabatan adalah untuk mendapatkan sertifikat pendidik agar memperoleh tunjangan profesional, sedangkan meningkatkan kompetensi mengajar merupakan motivasi kedua.
- Calon guru lulusan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) menganggap materi kuliah PPG prajabatan semester pertama monoton dan banyak mengulang materi di program S-1 PGSD.
- Kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) selaku penyelenggara PPG prajabatan bervariasi sehingga kualitas pelaksanaan dan lulusan program tersebut berbeda-beda.

Publikasi



Infografik “Perkembangan Hasil Studi Evaluasi Program PPG Prajabatan”



Catatan kebijakan “Memperbaiki Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Guru di Indonesia”

A2

CATATAN PERJALANAN GURU MUDA

Pada tahun-tahun pertama mengajar, guru muda mengalami transisi dari pendidikan guru ke pengalaman mengajar pertama, pembentukan identitas sebagai guru, dan perkembangan kemampuan mengajar paling pesat dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Penelitian ini merekam **pengalaman serta tantangan yang dihadapi guru muda pada tahun-tahun pertama mereka menjadi guru**. Tantangan yang mereka hadapi di periode ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan pendidikan guru dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan kemampuan guru muda di awal karier mereka.



Temuan studi

Guru muda harus berjuang sendiri di tahun-tahun awal menjadi guru. Mereka merasa kurang kompeten dan menghadapi berbagai kesulitan, seperti dalam menghadapi murid dengan karakter yang berbeda-beda, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, membangun kepercayaan dengan orang tua murid, membina hubungan yang profesional dengan rekan-rekan guru, dan menghadapi sarana dan prasarana di sekolah yang terbatas.

Publikasi



Kertas kerja “*A Policy Lens on Becoming a Teacher: A Longitudinal Diary Study of Novice Teacher Professional Identity Formation in Indonesia*” (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)



Infografik “Tantangan Guru Muda pada Tahun-tahun Pertama Mengajar”



Seri blog “Catatan Perjalanan Guru”



Blog “Dukungan pengembangan karier bagi guru di Indonesia sangat lemah dan membuat status ASN hanya jadi ‘zona nyaman’”



A3

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Selama empat dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mereformasi pengembangan profesionalisme guru. Meskipun demikian, kualitas guru Indonesia sampai saat ini masih rendah. Studi ini menyelidiki penyebab kegagalan upaya tersebut dengan mengkaji efektivitas program pengembangan profesionalisme guru terbaru dari pemerintah yang bernama **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)** dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Studi ini berfokus pada pelatihan guru sekolah dasar.



Temuan studi

Fitur-fitur penting pada pengembangan profesionalisme guru yang efektif tidak ada dalam PKB. Program PKB

- tidak memilih guru peserta berdasarkan pengalaman mengajar mereka yang sesungguhnya;
- tidak melakukan pemantauan terhadap guru peserta pascapelatihan;
- tidak memasukkan praktik mengajar ke dalam kurikulum pelatihan; dan
- tidak dirancang agar sesuai dengan pengalaman mengajar yang sudah dimiliki guru peserta.

Analisis tingkat sistem kami menunjukkan bahwa meningkatkan aspek teknis program pengembangan profesionalisme guru semata tidak akan cukup selama sistem pendidikan Indonesia belum berorientasi pada menghasilkan guru yang berkualitas.

Publikasi



Kertas kerja “*Systemic Constraints Facing Teacher Professional Development in a Middle-Income Country: Indonesia’s Experience Over Four Decades*” (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)



Infografik “Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia: Permasalahan Teknis dan Sistemik”



Blog “Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Empat Dekade Terakhir di Indonesia: Satu Langkah Maju, Dua Langkah Mundur”



Blog “Rapor kompetensi guru SD Indonesia merah, dan upaya pemerintah untuk meningkatkannya belum tepat”



Video “Sekilas tentang Diseminasi Hasil Penelitian Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)”

A4

TUNJANGAN ATAS KINERJA GURU (KIAT GURU)



Tingkat ketakhadiran guru di sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut rendah. Penelitian ini menyelidiki tiga intervensi yang menghubungkan pemantauan berbasis masyarakat dengan tunjangan dari pemerintah untuk guru-guru yang bekerja di daerah terpencil di Indonesia. Dapatkah pemantauan berbasis masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil? Dari ketiga intervensi tersebut, adakah yang berhasil meningkatkan kehadiran guru di sekolah dan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa?

Temuan studi

Intervensi pertama memberi peran kepada warga masyarakat lokal untuk mengevaluasi layanan guru secara individual (SAM) berdasarkan kartu skor yang telah disepakati sebelumnya, tanpa skema pemberian tunjangan. Intervensi kedua berupa SAM plus tunjangan tambahan yang diberikan kepada guru berdasarkan kehadirannya di sekolah yang direkam di kamera (SAM+Cam). Intervensi ketiga adalah SAM plus pemberian tunjangan tambahan yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil evaluasi di kartu skor guru (SAM+Kartu Skor).

Ketiga intervensi berhasil meningkatkan kehadiran guru di sekolah serta hasil pembelajaran siswa, namun, peningkatan pada intervensi SAM+Cam lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada intervensi SAM ataupun SAM+Kartu Skor.

Publikasi



Kertas kerja “*Scores, Camera, Action? Incentivizing Teachers in Remote Areas*” (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)



Blog “Apa yang Berubah? Mempelajari Insentif Guru, Akuntabilitas Sosial, dan Hasil Belajar Siswa di Indonesia”

A5

EVALUASI UJIAN NASIONAL

Kecurangan dalam ujian akan menurunkan tingkat akurasi penilaian kemampuan murid, dan dapat membelokkan fokus guru dan murid dari pembelajaran. Studi ini mengevaluasi dampak dari pengenalan **ujian nasional berbasis komputer (UNBK)** pada nilai ujian nasional sekolah menengah pertama di Indonesia sejak kebijakan tersebut diluncurkan pada 2015 hingga 2019.



Temuan studi

- Nilai ujian menurun secara drastis setelah penerapan UNBK; rata-rata nilai di tingkat sekolah menurun sebesar 0,4 standar deviasi. Sekolah dengan pola respons yang terindikasi melakukan kecurangan mengalami penurunan yang semakin besar pada nilai ujian mereka
- Nilai ujian kembali naik dalam waktu dua tahun setelah UNBK diperkenalkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sulitnya melakukan kecurangan dalam ujian berbasis komputer memunculkan insentif bagi pembelajaran.
- Ada efek *spillover* dari pelaksanaan UNBK dalam satu daerah. Penurunan kecurangan lebih tinggi pada sekolah-sekolah yang belum beralih ke sistem UNBK jika lebih banyak sekolah di daerah yang sama sudah beralih ke UNBK. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UNBK tidak hanya menghilangkan praktik curang, tetapi juga membuat masyarakat menjadi enggan melakukannya.

Publikasi



Kertas kerja “*From Cheating to Learning: An Evaluation of Fraud Prevention on National Exams in Indonesia*” (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)

A6 | ORGANISASI PROFESI GURU

Penelitian ini menganalisis apakah pemimpin organisasi profesi guru memiliki keahlian dalam hal kebijakan pendidikan—khususnya kebijakan yang berpengaruh pada guru di luar status kepegawaian. Penelitian ini juga mempelajari bagaimana (ada atau tidaknya) keahlian tersebut dapat membantu menjelaskan alasan terbatasnya cakupan pengaruh kebijakan yang dimiliki oleh organisasi profesi guru. Fokus penelitian ini adalah analisis yang terperinci tentang perubahan kebijakan tingkat nasional di Indonesia antara 2005 dan 2020, khususnya pada bagaimana PGRI sebagai organisasi profesi guru terbesar dan tertua di Indonesia, terlibat dalam pengambilan keputusan.

Temuan studi

PGRI perlu lebih meningkatkan keahliannya untuk bisa memengaruhi penyusunan kebijakan pendidikan mengingat saat ini mereka masih mengembangkan keahlian dalam bidang pembelajaran yang substansial.

Publikasi



Kertas kerja "*Exploring the Politics of Expertise: The Indonesian Teachers' Union and Education Policy, 2005-2020*" (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)



B1

INOVASI PENDIDIKAN DAERAH: TINJAUAN SOSIAL BUDAYA

Apa yang mendorong kelahiran inovasi pendidikan di tingkat lokal? Studi ini meneliti tiga kabupaten/kota di Indonesia dengan inovasi pendidikan yang cukup baik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut serta memahami bagaimana kondisi sosial budaya kabupaten/kota setempat memengaruhi kelahiran suatu inovasi pendidikan.

Temuan studi

Ada tiga aspek sosial budaya yang secara signifikan menentukan bagaimana inovasi lokal didefinisikan dan diterapkan di setiap kabupaten/kota, yaitu norma kepercayaan di antara anggota masyarakat, ada atau tidaknya tradisi kolaborasi di tingkat masyarakat dan elit, dan partisipasi masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan hasil dari perwujudan norma sosial dalam jejaring sosial suatu kabupaten/kota.

Berdasarkan temuan tersebut, kabupaten/kota dapat membangun hubungan untuk saling bertukar informasi dan inovasi sehingga dapat belajar dari satu sama lain. Melalui langkah ini, Pemerintah Pusat juga akan menyadari bahwa ada variasi kondisi di tingkat lokal saat menyusun kebijakan pendidikan nasional.



Publikasi



Kertas kerja “*Sociocultural Drivers of Local Educational Innovations: Findings from Indonesia*” (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris)



Infografik “Inovasi Pendidikan Daerah di Indonesia: Tinjauan Sosial Budaya”

B1

EKONOMI POLITIK INOVASI PENDIDIKAN DAERAH

Penelitian ini mengkaji dinamika politik kebijakan peningkatan kualitas pendidikan pada era desentralisasi. Analisis studi ini berfokus pada bagaimana perbedaan penggunaan kekuasaan kepala daerah dalam penunjukan pejabat pada birokrasi lokal dapat menjelaskan variasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Temuan studi

Pembatasan yang terlembaga terhadap penggunaan kekuasaan kepala daerah berpengaruh besar terhadap kebijakan pendidikan. Kontrol seperti itu diperlukan untuk pengembangan kapasitas birokrasi pemerintah daerah yang mumpuni guna merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan hasil pembelajaran siswa di daerahnya.

Pada kasus tertentu, pemimpin visioner yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan dapat mengisi kurangnya kapasitas birokrasi dalam perumusan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Namun, ketergantungan terhadap komitmen individual kepala daerah dapat berisiko pada perubahan kebijakan yang drastis oleh pemimpin terpilih pada periode kepemimpinan selanjutnya, kecuali terdapat mekanisme yang jelas guna memastikan keberlanjutan kebijakan tersebut.

Cek publikasinya di situs web RISE (rise.smeru.or.id).



B2 | MENYELEKSI GURU HONORER DI BUKITTINGGI



Guru pegawai negeri sipil (PNS) direkrut melalui tes PNS yang diselenggarakan secara terpusat. Sementara itu, guru honorer direkrut oleh sekolah melalui proses seleksi yang bervariasi dan tidak terstandarisasi. RISE bersama bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi mengembangkan mekanisme seleksi pengukuran kemampuan guru honorer yang berkorelasi dengan hasil pembelajaran siswa. Tes ini mengukur keterampilan kognitif, non-kognitif, dan mengajar guru. Selain itu, studi ini juga mengukur efektivitas mengajar guru dalam hubungannya dengan hasil pembelajaran siswa.

Temuan studi

Terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara kompetensi guru dalam numerasi dengan capaian numerasi siswa. Lebih jauh lagi, praktik mengajar guru yang dinilai melalui demonstrasi mengajar berkorelasi positif dengan capaian siswa.

Sementara itu, terdapat hubungan yang signifikan namun negatif antara kompetensi guru dalam literasi dengan hasil pembelajaran siswa dalam literasi. Pola yang sama juga terlihat pada korelasi antara penilaian portfolio guru dengan capaian pembelajaran siswa. Korelasi negatif dalam pengukuran literasi ini bisa jadi disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi guru di Indonesia dalam mengajarkan materi kepada siswa, mengingat tidak ada mata pelajaran khusus bahasa Indonesia dan pemahaman membaca.

Cek publikasinya di situs web RISE (rise.smeru.or.id).

B2

DAMPAK KEBIJAKAN PPDB BERBASIS ZONASI DI YOGYAKARTA

Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi telah berjalan sejak 2018 di Kota Yogyakarta. Salah satu tujuan kebijakan PPDB zonasi adalah menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa. Penelitian ini mempelajari dampak pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi terhadap pembelajaran siswa SMP di Kota Yogyakarta.

Temuan studi

- Jumlah siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang diterima di SMP negeri bertambah.
- Alokasi penerimaan siswa di SMP negeri sebelum dan sesudah penerapan PPDB zonasi dapat dibagi ke dalam 4 kelompok.

Kelompok 1/*Never Access*: Siswa yang domisilinya jauh dari sekolah dan nilai UASDA*-nya rendah tidak pernah bisa diterima di SMP negeri, baik sebelum maupun sesudah PPDB zonasi diterapkan.

Kelompok 2/*Lost Access*: Siswa yang domisilinya jauh dari sekolah dan nilai UASDA-nya tinggi jadi tidak bisa diterima di SMP negeri sesudah PPDB zonasi diterapkan.

Kelompok 3/*Gained Access*: Siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah dan nilai UASDA-nya rendah jadi bisa diterima di SMP negeri sesudah PPDB zonasi diterapkan.

Kelompok 4/*Always Access*: Siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah dan nilai UASDA-nya tinggi selalu bisa diterima di SMP negeri, baik sebelum maupun sesudah PPDB zonasi diterapkan.

*Ujian Akhir Sekolah Daerah

- Manfaat belajar yang dirasakan siswa pascapenerapan PPDB zonasi berbeda-beda.

Kelompok 1: Netral/tidak ada perbedaan

Kelompok 2: Hasil belajar siswa di kelompok 2 lebih rendah sesudah PPDB zonasi diterapkan

Kelompok 3: Hasil belajar siswa di kelompok 3 sedikit lebih tinggi sesudah PPDB zonasi diterapkan, tetapi perbedaannya tidak signifikan

Kelompok 4: Hasil belajar siswa di kelompok 4 lebih rendah sesudah PPDB zonasi diterapkan

Publikasi



Kertas kerja “*Who Benefits and Loses from Large Changes to Student Composition? Assessing Impacts of Lowering School Admissions Standards in Indonesia*” (hanya tersedia dalam bahasa Inggris)



Blog “Dampak sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri bagi para guru dan siswa”



Blog “Upaya Indonesia Mengatasi Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas: Studi Kasus SMP di Yogyakarta”



Infografik “Dampak Kebijakan PPDB Zonasi terhadap Hasil Pembelajaran Siswa di Yogyakarta”



Blog “Alasan Siswa dengan Kemampuan Akademik Rendah dan Siswa dari Keluarga Tidak Mampu di Yogyakarta Tidak Masuk ke SMP Negeri Terbaik—Meski Mereka Mampu”



B2

KETERLIBATAN ORANG TUA DAN PENINGKATAN PEMBELAJARAN DI KEBUMEN

Hasil studi diagnostik RISE di Kebumen menunjukkan orang tua di kabupaten ini umumnya tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait perkembangan belajar anak dari sekolah. Ditambah lagi, orang tua dengan tingkat pendidikan rendah kurang percaya diri dalam mendukung anak belajar di rumah. RISE bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen melaksanakan program “Peningkatan Partisipasi Aktif Orang Tua dalam Pendidikan Anak” yang dimulai pada Februari 2020 dan berlangsung selama 15 bulan. Program ini dilaksanakan di 65 sekolah dasar di 13 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Dalam program ini, orang tua dan wali murid menerima informasi dalam bentuk surat laporan belajar anak bulanan yang ditulis oleh guru beserta selebaran yang berisi cara-cara orang tua untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak.



Temuan studi

- Informasi yang diberikan ke orang tua setiap bulan meningkatkan keterlibatan mereka dalam mendampingi anak belajar di rumah serta komunikasi antara orang tua dan sekolah.
- Rendahnya kemampuan orang tua dalam mendampingi anak belajar serta kurang tepatnya dukungan dari guru kepada siswa selama periode belajar dari rumah menghambat dampak terhadap hasil belajar anak.
- Dampak positif program terhadap orang tua dan guru tidak turut meningkatkan skor numerasi siswa.

Publikasi



Kertas kerja "*Does Higher Parental Involvement Lead to Learning Gains? Experimental Evidence from Indonesia*" (hanya tersedia dalam bahasa Inggris)



Seri poster "Orang Tua Terlibat, Anak Hebat!"



B2

MEMBERIKAN OTONOMI KEPADA SEKOLAH DAN GURU DALAM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU DI JAKARTA



Berbagai studi menunjukkan, jika guru diberi otonomi untuk memilih sendiri pengembangan profesionalisme yang mereka minati, mereka akan lebih termotivasi untuk mengembangkan keterampilan mengajarnya. Menyadari pentingnya otonomi guru dan sekolah dalam hal pengembangan kemampuan guru, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berusaha mereformasi sistem pengembangan kemampuan guru yang sebelumnya bersifat penugasan. RISE turut mendukung reformasi ini dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menciptakan sistem yang memberi otonomi lebih kepada sekolah dan guru dalam pengembangan profesi guru. Sistem yang baru ini menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam mendorong guru untuk lebih aktif mengembangkan kemampuan mengajar mereka.

Temuan studi

- Guru dengan motivasi rendah rentan untuk tidak mengikuti kegiatan pengembangan profesionalisme apa pun ketika sistem yang baru, yang memberi otonomi kepada guru, mulai diterapkan.
- Kepemimpinan sekolah berperan penting dalam mengarahkan guru dengan motivasi rendah untuk menggunakan otonomi dalam mengembangkan kemampuan mengajar mereka. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat memanfaatkan agensi untuk memotivasi guru agar lebih aktif dalam pengembangan profesionalisme mereka.

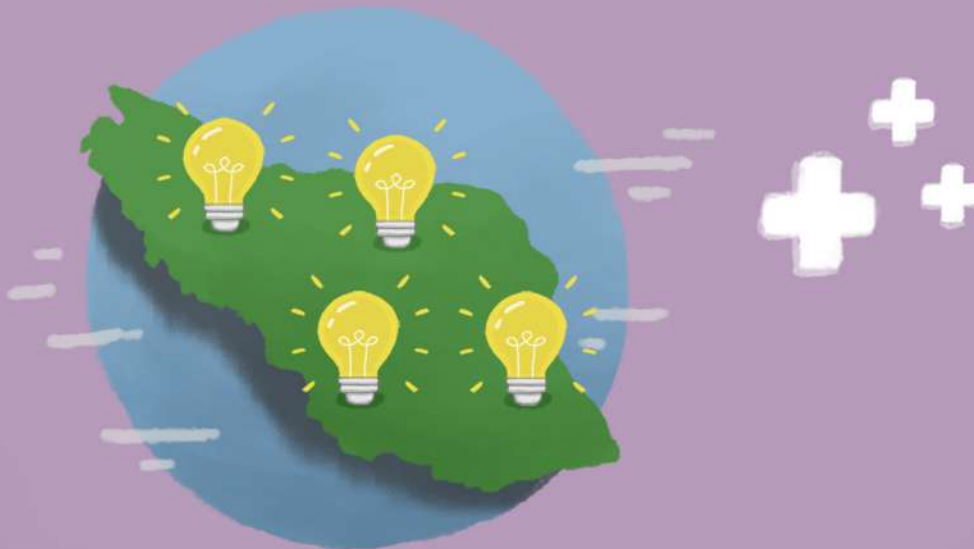
Cek publikasinya di situs web RISE (rise.smeru.or.id).

B3

PENYEBARAN INOVASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH

Otonomi daerah memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan merancang kebijakan yang sesuai dengan konteks daerah. Penelitian ini berupaya memahami evolusi kebijakan pendidikan daerah dan bagaimana kebijakan tersebut dapat menyebar ke daerah lain. Kami melakukan survei nasional terhadap dinas pendidikan daerah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan dua kebijakan pendidikan, yaitu insentif guru honorer dan bantuan keuangan siswa. Kami yakin penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita atas pembelajaran lembaga lokal dan meningkatkan penyebaran kebijakan yang berhasil di masa depan.

Cek publikasinya di situs web RISE (rise.smeru.or.id).



PENURUNAN KEMAMPUAN SISWA SELAMA PANDEMI COVID-19

Sistem pendidikan Indonesia terkena dampak yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Di sebagian daerah, sekolah harus ditutup selama lebih dari 18 bulan sehingga **pembelajaran pada masa pandemi berubah secara drastis**. Sebagian siswa, terutama yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah dan berdomisili di luar kota besar, kesulitan beralih ke pembelajaran daring karena fasilitas yang tidak memadai. Penelitian ini mengukur dampak dari disrupsi tersebut terhadap hasil pembelajaran. Segera setelah sekolah dibuka, kami melakukan penilaian terhadap hampir 17.000 siswa SD (di Bukittinggi) dan SMP (di Yogyakarta).



Temuan studi

Kami menemukan penurunan kemampuan siswa yang besar dan signifikan di kedua kota tersebut yang lebih banyak terjadi pada siswa dengan kemampuan awal tinggi. Penerapan kurikulum yang disederhanakan serta lebih tingginya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran siswa berhasil memitigasi besarnya dampak bagi siswa dengan kemampuan awal rendah.

Publikasi



Insight "Learning Loss or Learning Gain? A Potential Silver Lining to School Closures in Indonesia" (hanya tersedia dalam bahasa Inggris)



Apa Kata Para Pembuat Kebijakan tentang RISE

RISE Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah untuk mencari akar penyebab masalah pendidikan. Melalui serangkaian penelitian, RISE mendukung perumusan kebijakan pendidikan berbasis bukti agar kebijakan yang dihasilkan lebih fokus dan sesuai dengan konteks permasalahan.

"Riset berperan sangat penting sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan membantu mempersiapkan diri untuk tantangan di masa depan. Saya apresiasi sebesar-besarnya upaya yang telah dilakukan oleh RISE sebagai mitra dari Kemendikbudristek untuk mendorong riset kebijakan di bidang pendidikan. Keempat riset RISE yang dipaparkan hari ini [dalam Webinar Perkembangan Program RISE di Indonesia 2021] saya yakini akan membantu kementerian dan dinas dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Hasil evaluasi itu akan menjadi pegangan untuk penyusunan aturan dan kebijakan yang lebih tepat sasaran."

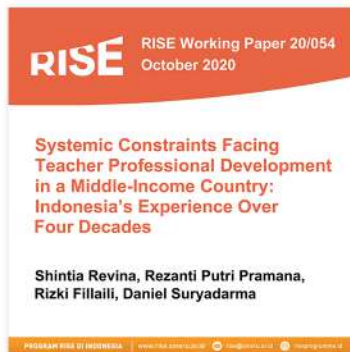
Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

"Hasil penelitian dari RISE ini tentu saja akan kami jadikan masukan penting untuk pengambilan kebijakan pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta dan ini mudah-mudahan dapat menjadi referensi dari berbagai pihak dan daerah-daerah lain mengenai pengambilan kebijakan. Tidak ada referensinya sama sekali biasanya kalau kita mengambil kebijakan, tapi dengan adanya penelitian ini maka kebijakan kita akan lebih rasional dan lebih ilmiah."

Budi Santosa Asrori, S.E., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Publikasi Kami

Hasil penelitian RISE dipublikasikan melalui situs web, media sosial serta outlet media lain dan dapat diakses secara bebas oleh pembuat kebijakan, komunitas riset maupun masyarakat umum.



Kertas kerja



Catatan Kebijakan



Insight



Infografik



Video



Seri podcast

Website

rise.smeru.or.id

Instagram

[@riseprogramme.id](https://www.instagram.com/riseprogramme.id)



rise.smeru.or.id



rise@smeru.or.id



[riseprogramme.id](https://www.instagram.com/riseprogramme.id)